

**Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Selama
Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi Sumatera Barat**
*Implementation Of Poverty Reduction Program During The Covid-19
Pandemic In Bukittinggi City*

¹ Nabilla, ² Roni Ekha Putera, ³ Hendri Koeswara

Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Andalas, Padang

Email: ¹nabillatyta@gmail.com, ²roniekhaputera@soc.unand.ac.id,

³hendrikoeswara@soc.unand.ac.id

Kata Kunci:

ABSTRAK

*manajemen program,
penanggulangan
kemiskinan, covid-19, Kota
Bukittinggi*

Permasalahan kemiskinan memang tidak akan berhenti untuk dibicarakan, ketimpangan kondisi pendapatan perekonomian dalam masyarakat memang bukan permasalahan sepele lagi yang dapat diabaikan, karena kemiskinan ini juga menjadi sumber faktor untuk permasalahan lainnya dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah sebagai agen kepercayaan masyarakat dalam mengelola kehidupan negara juga berupaya untuk mewujudkan tujuan negara dalam hal kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan mulia negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi “ Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia” maka dalam hal ini pemerintah menetapkan kemiskinan sebagai salah satu fokus dalam pembangunan berkelanjutan, yang hal ini juga berdasarkan kepada kesepakatan internasional yang tertuang saat ini dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menetapkan kemiskinan sebagai tujuan pertama dalam fokus pembangunan berkelanjutan. Pada tulisan ini penulis akan melihat bagaimana pemerintah melakukan manajemen terhadap pelaksanaan program-program dalam penanggulangan kemiskinan terutama pada masa sulit seperti masa pandemi Covid-19 saat ini, karena keadaan penyebaran wabah virus ini memberikan dampak yang besar kepada kehidupan bangsa terutama dalam perihal perekonomian negara. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data primer dari wawancara, dan data sekunder dari literatur terkait seperti dari jurnal ilmiah, e-book hingga website pemerintah terkait lainnya.

Keywords:

management program,
poverty reduction, Covid-
19, Bukittinggi City

Abstract

The problem of poverty will not stop to be discussed, the inequality of economic income conditions in society is no longer a trivial problem that can be ignored, because poverty is also a source of factors for other problems in people's lives. The government as an agent of public trust in managing the life of the state also strives to realize the goals of the state in terms of prosperity and welfare of the people, accordance goals of the Indonesian state in the Preamble 1945 Constitution in the fourth paragraph which reads "... Protecting the entire Indonesian nation and the entire homeland of Indonesia to promote public welfare, educate the nation's life and participate in carrying out world order ..." . So in this case the government has determined poverty as one of the focuses in sustainable development, which is also based on international agreements that are currently stated in the Sustainable Development Goals (SDGs) which set poverty as the first goal in the focus of sustainable development. In this paper, the author will look at how the government manages the implementation of programs in poverty alleviation, especially during difficult times such as the current Covid-19 pandemic, because the state of the spread of this virus outbreak make impact on the life of the country, especially in terms of the country's economy. This research uses qualitative descriptive methods, with primary techniques data collection from interviews, and secondary data from related literature such as from scientific journals, e-books to other related government websites

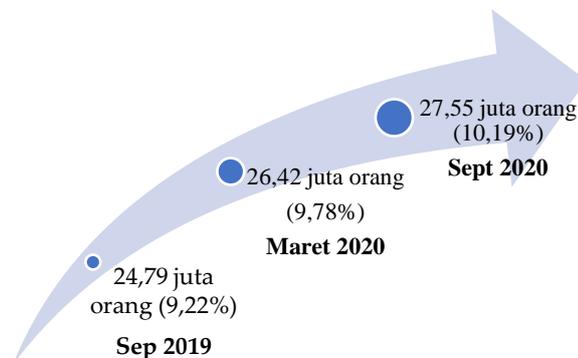
A. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia menjadikan fokus pemberantasan kemiskinan menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan berkelanjutan bukan tanpa sebab, melihat kemiskinan dalam kerangka multidimensi di analisa menjadi salah satu faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya dampak pengaruh bidang lainnya dalam kehidupan masyarakat. Dampak secara merantai ini secara sederhana dapat dilihat ketika keluarganya berada dalam jurang kemiskinan, tidak adanya kekuatan ekonomi untuk membiayai sekolah maka banyak anak-anak yang mengalami putus sekolah di Indonesia (CNN,2017), contoh lainnya, ketika dalam sebuah keluarga kepala keluarganya tidak dapat menghasilkan pundi-pundi uang untuk memenuhi kebutuhan hidup maka kepala keluarga ini secara tidak langsung melampiasakan hal ini kepada istri dan anak-anaknya, hal ini yang menjadi akibat banyaknya perempuan dan anak-anak menjadi korban dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Kemenppa,2018), ataupun dilihat pada kasus lainnya akibat tidak punya sumber pendapatan masih tingginya terjadinya kasus kriminal seperti pencurian, perampokan yang dilatar belakangi kebutuhan ekonomi. Seperti pada contoh kasus berikut dimana seorang ibu di Jakarta harus mencuri makanan toko untuk anaknya akibat tidak mempunyai uang (Detikfood,2021) Ibu ini menjelaskan bahwa dia melakukan hal tersebut secara terpaksa karena tidak mempunyai uang lagi untuk memberi makan anaknya yang sedang menangis karena kelaparan, maka mau tidak mau ibu ini kemudian mencuri

makanan pada toko roti tersebut. Ataupun kasus lainnya yang terjadi dimana seorang ayah di Bali yang nekat merampok turis di daerahnya untuk membayar tagihan melahirkan istrinya di rumah sakit (Gatra.com,2019), dilansir dari portal berita ini diceritakan bahwa ayah ini sudah tidak tau lagi harus mencari dana untuk biaya lahiran istrinya, maka ketika tidak sengaja melihat turis yang ia sangka pasti akan sangat banyak membawa uang maka dia rampok untuk membayar tagihan rumah sakit tadi dan berbagai kasus lain sebagainya yang terjadi baik secara terencana ataupun tidak terencana yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah kebawah dikarenakan faktor ekonomi ini. Banyaknya laporan kasus ini sebagian besar akibat dari rendahnya tingkat pendapatan perekonomian yang memaksa individu ini melakukan hal yang tidak diinginkan.

Keadaan ini semakin diperparah dengan kondisi dua tahun belakangan ini yang disebabkan oleh penyebaran dari Wabah *Virus Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), yang semakin menyulitkan tingkat perekonomian masyarakat. Kondisi penyebaran wabah virus ini mengakibatkan keadaan pandemi yang menyulitkan masyarakat dalam aktivitas jual beli karena berbagai kebijakan pembatasan *social distancing* dan kebijakan serupa yang dilaksanakan pemerintah. Bahkan akibat dari keadaan pandemi Covid-19 ini, tercatat data hingga bulan Agustus Tahun 2020 yang lalu memberikan dampak kenaikan tingkat pengangguran sebesar 14,28 % atau sekitar 29,12 juta orang dan juga merumahkan karyawan sekitar 1,77 juta karyawan (Kementerian Keuangan,2017). Menyebabkan juga terjadinya ketimpangan perekonomian negara yang semula pada Tahun 2019 berada pada rasio 0,380 kemudian naik menjadi rasio sebesar 0,385 pada Tahun 2020 ini (Katadata.co.id, 2021). Lebih lengkapnya, berikut gambaran dari tingkat kenaikan kemiskinan di Indonesia selama terjadinya Covid-19.

Gambar 1. Tingkat Kemiskinan di Indonesia



Sumber: Kementerian Keuangan.2020. Potret Ekonomi Indonesia Tahun 2020 hal 61

Berdasarkan gambar 1 diatas terlihat jelas dalam beberapa dekade waktu terdekat terjadi lonjakan tingkat kemiskinan terutama akibat dari Pandemi Covid-19 ini, dalam September Tahun 2019 berada pada 9,22 % kemudian naik pada awal masa masuknya Pandemi Covid-19 di Indonesia pada Bulan Maret Tahun 2020 menjadi 9,78 %, setelah itu dalam masa panjang pandemi ini pada Bulan September Tahun yang sama menjadi 10,19 % yang mana dalam kurun waktu setengah tahun kemudian naik menjadi 0,41 % atau dalam waktu 6 bulan ini telah terjadi menambah jumlah masyarakat miskin sebanyak 1.13 juta jiwa. Maka dalam kurun waktu ini juga akan sangat banyak dampak lainnya secara berkesinambungan seperti jumlah masyarakat yang mengalami kehilangan

pekerjaan, kelaparan, tingkat kesehatan menurun, putus sekolah, kenaikan anak jalanan dan berbagai dampak lanjutan lainnya.

Menyikapi hal kenaikan grafik kemiskinan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan program yang sekiranya dapat membantu menaikkan taraf kehidupan masyarakat, seperti. Pertama, Program Bantuan Langsung Non-Tunai yang tertuang dalam Perpres No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai. Dimana pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Bantuan Sosial yang dimaksud adalah berupa “ bantuan uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial “. Sedangkan pada ayat (2), kemudian yang dimaksud Risiko Sosial sendiri adalah “ kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak akan hidup dalam kondisi wajar “. Masyarakat yang berhak menerima bantuan program ini mengacu kepada Ayat (4) bahwa “ Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial “.

Kedua, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Program ini dimaksudkan pada Pasal 1 Ayat (1) yaitu “ program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH “. Kemudian yang berhak untuk menerima program bantuan ini dijelaskan pada pasal yang sama di Ayat (5), yang berbunyi “Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut keluarga penerima manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan”. Program Keluarga Harapan ini sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat miskin, membantu mengurangi angka beban, diharapkan bantuan ini akan mengubah perilaku keluarga miskin, kemudian tentu saja berfokuskan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia hingga kepada bagaimana salah satu langkah negara dalam inklusi keuangan (Kemensos.go.id).

Ketiga, Peraturan Menteri Sosial RI No, 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Program ini menekankan kepada pelaksanaan pemberian bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui uang elektronik di E-Warong. Pada Pasal 1 ayat (2) peraturan menteri ini dijelaskan bahwa “Elektronik Warung Gotong Royong atau selanjutnya disebut e-warong merupakan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan /pembelian bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial bersama bank penyalur”. Pada Ayat (3) kemudian dijelaskan Keluarga Penerima Manfaat atau KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial tersebut. Program ini dilaksanakan dengan mekanisme pelaksanaan dimana para keluarga penerima manfaat ini mendapatkan bantuan pangan yang akan disalurkan oleh pemerintah secara non tunai, yaitu secara elektronik sejumlah Rp.110.000/ Kepala Penerima Manfaat /Bulan pada akun tertentu yang kemudian ditukarkan dengan pemberian bahan pangan di tempat-tempat yang sudah ditunjuk (Kawung, dkk 2020).

Kemudian dalam menyikapi terhadap keadaan yang masih belum selesai dan masih terkena dampak Covid-19, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan program seperti Program Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Republik Indonesia Nomor 6 pada Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian

Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Pada Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwasannya “Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional”.

Terakhir, Peraturan Menteri Keuangan RI No 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Pada peraturan menteri ini dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (33) dinyatakan bahwa “Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19)”. Bantuan ini diberikan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) bahwa BLT Desa diberikan dengan kriteria penerima keluarga penerima manfaat sebagai berikut a) Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan b) Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.

Beberapa kebijakan diatas merupakan salah satu dari sekian banyak upaya yang gencar dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam gerakan menanggulangi tingkat kemiskinan yang ada di negeri tercinta Indonesia ini. Anderson kemudian menjelaskan kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah sebagai pejabat atau lembaga berwenang dalam mengatasi masalah untuk tujuan tertentu (Tachan,2006). Definisi ini mengacu kepada upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Melihat kemiskinan menjadi akar permasalahan yang sulit diberantas dalam waktu cepat karena dirasa akarnya sudah terlalu tajam dan kuat di bawah maka perlu sekiranya dicarikan alternatif penyelesaiannya secara bertahap. Kebijakan ini kemudian disahkan melalui proses tahapan yang menurut Mustopadidjaja mengacu kepada tiga proses utama yaitu proses dalam kesimpulan permasalahan, berupa proses perumusan kebijakan, proses implementasi kebijakan dan proses pengawasan dan penilaian hasil pelaksanaan kebijakan tersebut (Tachan,2006). Kebijakan publik yang berhasil dibuat ini kemudian akan diimplementasikan untuk menilai sejauh mana upaya ini mampu memecahkan *problem* permasalahan, implementasi ini juga akan disesuaikan dengan unsur pelaksanaan yang dijelaskan oleh Abdullah yaitu terdiri dari unsur aktor program, rencana kegiatan pelaksanaan dan target implementasi kebijakan publik (Tachan,2006).

B. METODE

Pelaksanaan analisis topik penelitian ini kemudian dilakukan peneliti dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu kualitatif deskriptif, penulis memilih metode ini dikarenakan melalui metode ini akan mampu menjelaskan mengenai analisa penelitian dengan topik manajemen pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan pada masa pandemi Covid-19 terutama pada skala pemerintahan daerah yaitu berfokuskan penelitian di Kota Bukittinggi ini secara lebih jelas dan terinci. Kemudian dalam memperkuat argumen penulisan, penulis menggunakan teknik pengambilan data primer berupa wawancara langsung dengan Ibu Indra Hartati, yang menjabat sebagai Kepala bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial dari Dinas Sosial Kota Bukittinggi. Kemudian arugumen penelitian ini akan ditambah dengan data sekunder yang berasal dari data literatur seperti dari berbagai dokumen, jurnal ilmiah, *e-book* , portal berita hingga website resmi pemerintahan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberantasan kemiskinan untuk menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik sangat diperlukan bantuan dan kerja sama yang kuat dengan berbagai pihak agar kebijakan ini terlaksana secara tepat sasaran. Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat merupakan impian semua pemerintahan negara sebagai bentuk telah berhasilnya pelaksanaan program dan kepemimpinan kebijakan daerahnya. Begitupula dengan pemerintahan pada pemerintahan daerah seperti di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan fokus pembangunan daerahnya juga memfokuskan pengurangan kemiskinannya sebagai salah satu bidang yang diprioritaskan. Demi terciptanya tujuan mulia pemerintah Kota Bukittinggi dalam menjadikan Kota Bukittinggi sebagai kota sejahtera dan masyarakatnya bebas dari jurang kemiskinan (Kotaku.pu.go.id).

Pemerintah Kota Bukittinggi memperlihatkan keseriusannya dalam urusan pemberantasan kemiskinan dengan telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang di bantu khusus dari 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya terdiri dari Dinas Sosial Kota Bukittinggi, Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kota Bukittinggi, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi, dan dinas terkait lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya dan perannya dalam penanggulangan kemiskinan tim ini kemudian mengawali langkah pemberantasan dengan melakukan penyusunan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah Kota Bukittinggi melalui 5 tahapan utama (Bukittinggikota.go.id,2016), yaitu berupa. Pertama, penentuan prioritas skala masalah. Kedua Menentukan prioritas intervensi/determinan masalah. Ketiga, menentukan prioritas wilayah. Keempat, menentukan prioritas rumah tangga sasaran dan terakhir menentukan relevansi target kegiatan dengan APBD yang ada. Kemudian TKPK ini juga mempunyai dua tugas pokok, berupa Koordinasi terhadap output masing-masing OPD dan melakukan pengendalian terhadap laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait keseluruhan kegiatan tersebut (Bukittinggikota.go.id,2016).

Keseluruhan OPD yang tergabung dalam tim ini juga mempunyai sub kegiatan masing-masing yang berfokuskan kepada penanggulangan kemiskinan sesuai dari arahan masing-masing kementerian pusat. Sehingga permasalahan kemiskinan tidak berfokuskan kepada penyelesaian oleh satu OPD Dinas Sosial saja seperti yang selama ini mungkin kita perkirakan. Misalkan saja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, akibat faktor kemiskinan maka banyak anak-anak yang mungkin tidak bisa bersekolah ataupun terancam putus sekolah, sehingga dalam membantu dalam hal pendidikan dari siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu maka diberlakukannya beberapa upaya seperti pemberian uang sekolah gratis untuk sekolah dasar negeri, dikeluarkanlah berbagai program beasiswa, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana sekolah yang lengkap dan bebas biaya dan sebagainya. Begitu pula dengan OPD lainnya, masing-masing OPD akan menyesuaikan kebijakan dan upaya sesuai dengan fungsi dan peran OPD tersebut dalam pemerintahan, keseluruhan OPD akan

mempunyai sub kegiatan unit khusus dalam hal penanggulangan kemiskinan yang juga kemudian dibantu dengan bantuan yang diberikan Program kebijakan pusat seperti Bantuan Langsung Non Tunai, pelaksanaan program Keluarga Harapan, Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, hingga Bantuan Langsung Tunai juga dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi yang mana seluruh program ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun beberapa kebijakan lainnya yang akan didanai sendiri oleh daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini dijelaskan oleh ibu Indra Hartati yang menjabat sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial di Dinas Sosial Kota Bukittinggi, yang menerangkan kepada penulis, yaitu :

“ Pemerintah Kota Bukittinggi banyak melaksanakan program pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, hal ini sebagai bentuk upaya pemerintah tanggap akan kebutuhan dan permasalahan dari masyarakatnya. Pelaksanaan program bantuan ini tidak hanya oleh Dinas Sosial saja tapi juga dengan 13 OPD lainnya di Kota Bukittinggi yang terkait dan mempunyai sub kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan, seperti oleh, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan banyak lagi. Seluruhnya tergabung kepada TKPK dan sub kegiatan unit ini akan disesuaikan dengan arahan dan pedoman dari masing-masing kementerian. Pelaksanaan dari pemberian bantuan ini ada yang berasal dari dana APBN yang dilaksanakan setiap tahunnya, seperti pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang kita bekerjasama dengan BRI (Bank Rakyat Indonesia), Program Sembako yang juga melalui Bank BRI yang dilakukan pemeriksaan data melalui rekapan data apakah masyarakat ini masih berhak mendapatkannya atau tidak, jika sudah dapat dikategorikan tidak maka masyarakat ini sudah naik taraf hidupnya. Masyarakat penerima bantuan akan diberitahu termasuk list yang mendapatkan bantuan untuk kemudian dapat mengambil bantuan tersebut melalui rekening dengan bank yang bersangkutan.”

Berdasarkan wawancara tersebut dijelaskan pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dalam pelaksanaan pemberantasan kemiskinan di daerahnya, diantaranya dengan melakukan kerja sama dengan berbagai *stakeholder* untuk membantu memecahkan masalah secara bersama. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bukittinggi selain membentuk TKPK tersebut pemerintah dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemberian bantuan dari pemerintah pusat akan dibantu dikelola oleh Bank BRI. Pemerintah Kota Bukittinggi juga menghimbau kepada *street bureaucracy* seperti dari tingkat RT/RW, Kelurahan hingga Kecamatan untuk secara berkala selalu memberikan update info mengenai masyarakatnya yang membutuhkan untuk dimasukkan kepada list nama masyarakat penerima bantuan, yang mana list ini kemudian akan dibantu dikelola pemberian bantuannya oleh Bank BRI. Kemudian melihat akibat Covid-19 pada dua tahun belakangan ini maka seluruh program bantuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini saat sebelum masa pandemi Covid-19 juga tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk diberikan kepada yang berhak menerima, tidak semua program dahulu yang dihilangkan namun akan ada beberapa perubahan penerima ataupun perubahan bentuk bantuan karena suatu keadaan, misalkan penambahan bantuan karena terdampak pandemi Covid-19 ataupun keadaan lainnya. Hal ini kemudian dijelaskan pada wawancara berikut ini.

“Untuk pada masa pandemi Covid-19 ini tidak ada perubahan program yang berarti karena fokus kita pemberantasan kemiskinan ini memang sudah aja sejak lama, mungkin ada sedikit tambahan bantuan terutama kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 seperti keluarga yang kepala keluarganya meninggal karena Covid-19, ataupun masyarakat lansia yang terkena Covid-19 dan tidak ada keluarganya yang merawatnya. Selama pandemi Covid-19 pemerintah Kota Bukittinggi juga berkolaborasi dengan mulai dari pemerintahan pusat, pemerintah di daerah lainnya, hingga dari pihak swasta terkait, sehingga tidak jarang masyarakat miskin dan yang penerima prioritas bisa mendapatkan banyak bantuan sekaligus dari berbagai pihak. Tambahan bantuan selain yang sudah disebutkan juga ada pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 selama beberapa kali seperti pada tahun 2020 pada tahapan pertama bulan Maret – Juni sebanyak Rp. 600.000 kemudian pada bulan Juli hingga Desember sebanyak Rp.300.000 kemudian pada tahun 2021 pada bulan Januari hingga bulan Juli sebanyak Rp. 300.000. “

Maka berdasarkan wawancara tersebut, disimpulkan berdasarkan wawancara di atas dijelaskan Kota Bukittinggi tetap melaksanakan berbagai bentuk pemberian bantuan yang sebelumnya sudah dilakukan secara berkala pada masa sebelum pandemi Covid-19 ini, namun dikarenakan kondisi pandemi semakin menyebabkan kondisi perekonomian masyarakat menurun akibat banyaknya masyarakat yang kehilangan ranah pendapatannya maka ada berbagai bantuan yang diberikan baik oleh pemerintah pusat ataupun dari pemerintahan kota, salah satunya dapat dilihat pada kegiatan programnya memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 600.00 pada Bulan Maret Tahun 2020 dan Rp. 300.000 pada Juni 2020 dan Juli Tahun 2021. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Bukittinggi selama pandemi Covid-19 juga bekerjasama dengan lembaga atau pihak lainnya dalam membantu kehidupan masyarakat Bukittinggi yang terdampak, diantaranya dengan berbagai pemerintah daerah lainnya, stakeholder lainnya, berbagai bantuan yang ditawarkan oleh pihak swasta ataupun yang berasal dari *ninik mamak urang sumando* dan bantuan untuk kaum nagari dari perantauan yang saling bahu membahu dalam meringankan beban masyarakat Kota Bukittinggi secara bersama-sama

D. SIMPULAN

Kemiskinan memang menjadi prioritas pembangunan karena dinilai kemiskinan ini sangat menyangkut banyak bidang kehidupan atau multidimensi, berbagai upaya kebijakan perlu sekiranya dilaksanakan untuk membantu menaikkan taraf kehidupan masyarakat miskin untuk menuju kehidupan yang lebih baik salah satunya dengan pemberian berbagai program bantuan. Seperti adanya Bantuan Langsung Non-Tunai, adanya Program Keluarga Harapan, Sembako pada pelaksanaan E-Warong dan sebagainya yang menjadi upaya bantuan utama. Pelaksanaan program ini dengan menargetkan masyarakat dan keluarga yang sesuai data keluarga yang tergolong miskin dan memang butuh bantuan. Tidak hanya itu pemberian bantuan ini terus gencar diberikan terutama pada dua tahun belakangan yang diakibatkan oleh keadaan bersama dari pandemic Covid-19 yang merusak tatanan perekonomian negara yang semakin mempersulit pelaksanaan ekonomi masyarakat. Hilangnya mata pencaharian masyarakat ataupun sulitnya kegiatan jual beli saat pandemi ini memang berdampak kepada seluruh masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat. Maka Pemerintah Kota Bukittinggi juga dalam rangka mewujudkan cita-cita kota menuju kehidupan sejahtera kemudian membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang berkoordinasi langsung dengan 13

OPD terkait. Melaksanakan arahan dan pedoman pemerintah pusat terkait pelaksanaan program bantuan tersebut. Dalam program penanggulangan kemiskinan semasa pandemi Covid-19 ini tidak banyak yang berubah, program bantuan yang sebelumnya tetap ada namun hanya mengalami perubahan bentuk bantuan, perubahan penerima dikarenakan suatu hal ataupun hanya menambah program bantuan pandemi ini bersama pihak lain seperti Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 dan bantuan bahan sembako yang diberikan dengan anggaran dari APBD kota. Pelaksanaan ini pada Kota Bukittinggi dibantu oleh berbagai pihak seperti pemuka agama, pemuka adat, pihak swasta ataupun berbagai stakeholder lainnya dalam membantu meringankan beban bersama.

REFERENSI

- Bukittinggikota.go.id. 2016. *Peningkatan Kapasitas dan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD) Kota Bukittinggi*. Diunduh dari : (<http://bukittinggikota.go.id/berita/peningkatan-kapasitas-dan-rapat-koordinasi-tim-koordinasi-penanggulangan-kemiskinan-daerah-tpkd-kota-bukittinggi>).
- CNN Indonesia. 2017. *Tingginya Angka Putus Sekolah di Indonesia*. Diunduh dari : (<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20170417145047-445-208082/tingginya-angka-putus-sekolah-di-indonesia>).
- Detikfood. 2021. *Kasihannya ! Tak Punya Uang, Ibu Ini Terpaksa Curi Makanan untuk Makan anaknya*. Diunduh dari : (<https://food.detik.com/info-kuliner/d-5558123/kasihannya-tak-punya-uang-ibu-ini-terpaksa-curi-makanan-untuk-makan-anaknya>).
- Gatra.com. 2019. *Lahiran Tak Punya Duit Arjuna Merampok Turis di Bali*. Diunduh dari : (<https://www.gatra.com/detail/news/460190/hukum/lahiran-anak-tak-punya-duit-arjuna-merampok-turis-di-bali>).
- Katadata.co.id. 2021. *Potret Kemiskinan di Indonesia Akibat Covid-19*. Diunduh dari : (<https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/602f7fec0d335/potret-kemiskinan-di-indonesia-akibat-covid-19>).
- Kawung, A. M., Lumolos, J., & Sampe, S. (2020). Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Kepada Keluarga Penerima Manfaat Di Kelurahan Mahakeret Barat Dan Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 1(4).
- Kemenppa. 2018. *Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya*. Diunduh dari : (<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya>).
- Kementerian Keuangan. 2020. *Potret Ekonomi Indonesia Tahun 2020*.
- Kotaku.pu.go.id. *Peran Pemda dalam Nangkis Melalui PNPM Perkotaan Bukittinggi*. Diunduh dari : (<http://kotaku.pu.go.id/view/3748/peran-pemda-dalam-nangkis-melalui-pnpm-perkotaan-bukittinggi>).
- Pkh.Kemensos.go.id. *Apa Itu Program Keluarga Harapan*. Diunduh dari : (<https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/602f7fec0d335/potret-kemiskinan-di-indonesia-akibat-covid-19>).
- Tachan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit Aipi Bandung.